

ABSTRACT

Indonesia has the third largest forest in the world. Various forestry policies have been issued by the government to improve the welfare of forest communities and improve environmental quality. However, this policy is not running well, as can be seen from the high rate of deforestation, the poverty rate for forest communities is still high, and community participation is still low. Taking a case study in the Sesaot Community Forest (Hutan Kemasyarakatan / HKm) area, West Nusa Tenggara Province, this paper aims to explain how the process and strategy of the community forestry program, so that this plays an important role in community welfare and environmental sustainability. Data obtained through observation, document search, and interviews with related parties. The results show that community forestry programs need strategies to be well accepted by forest communities, especially farmers. Providing incentives, respecting lokal customs, and developing Non-Timber Forest Products (HHBK) are the main attractions for lokal communities to participate in social forestry programs. Social forestry allows farmers to add assets for welfare and timber plants are maintained in the forest area. This paper suggests that social forestry continues to be developed even though there are still many shortcomings that must be improved.

ABSTRAK

Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia. Berbagai kebijakan kehutanan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ssekitar hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Namun kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik, terlihat dari tingginya laju deforestasi, angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan masih tinggi, dan partisipasi masyarakat masih rendah. Mengambil studi kasus di kawasan Hutan Kemasyarakatan Sesaot (Hutan Kemasyarakatan/HKm), Provinsi Nusa Tenggara Barat, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses dan strategi kebijakan perhutanan sosial, khususnya skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), memiliki peran penting terhadap kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Data diperoleh lewat observasi, penelusuran dokumen, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa program hutan kemasyarakatan membutuhkan strategi agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar hutan, khususnya para penggarap. Pemberian insentif, penghormatan adat istiadat setempat, dan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menjadi daya tarik utama masyarakat setempat untuk mengikuti program perhutanan sosial. Perhutanan sosial memungkinkan penggarap menambah aset untuk kesejahteraan dan terjaganya tanaman kayu sehingga hutan tetap lestari. Saran yang dapat diberikan yaitu agar terus dikembangkan program ini meskipun masih terdapat banyak kekurangan yang harus di perbaiki.